



PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

KEMENTERIAN PUPR
DITJEN CIPTA KARYA



LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

2020

**DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
I. PENDAHULUAN	5
A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas	5
1. Pembentukan	5
2. Tugas dan Fungsi	7
B. Sumber Daya Manusia	8
C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	9
II. PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2020	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pencapaian Kinerja Organisasi	14
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	14
C. Perbandingan Capaian Indikator PK dengan Tahun Sebelumnya	22
D. Akuntabilitas Keuangan	23
IV. PENUTUP	28
LAMPIRAN (PK DINPERKIM 2020)	30

----- **IKHTISAR EKSEKUTIF** -----



Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**).

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas*, maka *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas* mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam tahun 2020 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,982	99,982	100,00
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,018	0,018	100,00
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	<i>Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni</i>	%	85,17	85,20	100,04
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	<i>Persentase Permukiman yang Tertata</i>	%	9,45	9,32	98,62
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	<i>Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar</i>	%	76,81	78,76	102,54

- Sasaran 1 tercapai dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00 %
- Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,04 %
- Sasaran 4 tercapai dengan nilai 98,62 %
- Sasaran 5 tercapai dengan nilai 102,54 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan, dan sangat signifikan. Prestasi ini cukup menggambarkan kinerja SKPD yang efektif, efisien. Demikian juga dengan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari 5 Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 88,93 %

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	595.841.250	95,05
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	163.895.100	90,91
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	8.175.286.550	95,00
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	313.289.717	70,27
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	6.132.770	93,42
			Rata-rata		88,93

Dari 5 Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 5,64 %

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	95,05	4,95
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	90,91	9,09
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	95,00	5,03
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	70,27	-
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	93,42	9,12
			Rata-rata		5,64

Purwokerto, Februari 2021

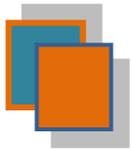
KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671229 199002 1 002



BAB 1

PENDAHULUAN

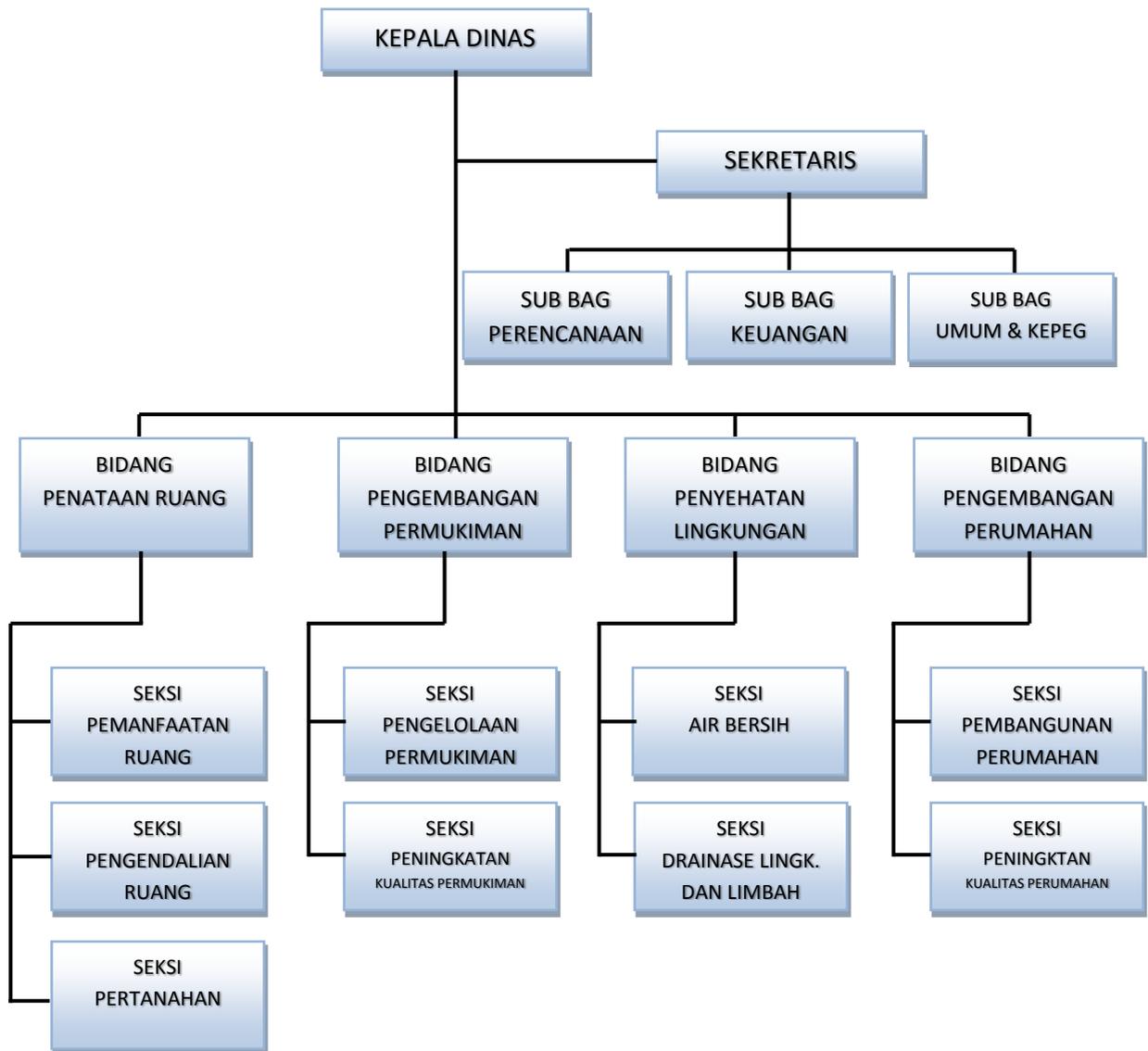
A. Tugas dan Fungsi DINPERKIM Kabupaten Banyumas

1. Pembentukan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) Kabupaten Banyumas, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penataan Ruang**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - b. Seksi Pengendalian Ruang
 - c. Seksi Pertanahan
4. **Bidang Pengembangan Permukiman**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Permukiman
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
5. **Bidang Penyehatan Lingkungan**, terdiri dari :
 - a. Seksi Air Bersih
 - b. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah
6. **Bidang Pengembangan Perumahan**, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS :



2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
3. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
7. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
8. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada data berikut :

1. *Keadaan aparatur yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menurut golongan.*

PNS DINPERKIM	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	JML
Kepala Dinas	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	10	9	1	20
Bid. Penataan Ruang	-	1	5	1	7
Bid. Pengembangan Permukiman	-	-	5	1	6
Bid. Penyehatan Lingkungan	-	2	4	1	7
Bid. Pengembangan Perumahan	-	1	4	1	6
JUMLAH	-	14	27	6	46

2. *Keadaan personil menurut eselon*

ESELON	JUMLAH
Eselon II B	1 orang
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	4 orang
Eselon IV A	11 orang
JUMLAH	17 ORANG

3. *Keadaan personil menurut pendidikan formal*

PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
Pendidikan setingkat S2	7
Pendidikan setingkat S1/D4	24
Pendidikan setingkat D3	2
Pendidikan setingkat SLTA	11
Pendidikan setingkat SLTP	1
Pendidikan setingkat SD	1
JUMLAH	46 ORANG

C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- ✓ Kurangnya sarana-prasarana penunjang pelayanan
- ✓ Kurangnya kompetensi sumber daya manusia

b. Permasalahan Bidang Penyehatan lingkungan

- ✓ Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak dan berkelanjutan
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)
- ✓ Masih kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan SPAL oleh masyarakat
- ✓ Masih rendahnya cakupan akses air minum aman, layak dan berkelanjutan
- ✓ Masih rendahnya infrastruktur air bersih
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan SPAM oleh masyarakat
- ✓ Minimnya jumlah sumber air yang bisa dimanfaatkan

c. Permasalahan bidang Penataan ruang

- ✓ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan tata ruang
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan aturan tata ruang
- ✓ Masih kurangnya personil untuk pemantauan pengendalian tata ruang
- ✓ Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan inverstasi

d. Permasalahan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

- ✓ Berkembangnya lingkungan Kumuh perkortaan
- ✓ Masih kurangnya kuantits dan kualitas infrastruktur permukiman

e. Permasalahan bidang Pengembangan Perumahan

- ✓ Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
- ✓ Masih tingginya backlog kebutuhan perumahan

2. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis berdasarkan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada masa Renstra tahun 2019-2023 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan Kabupaten Banyumas berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 dan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

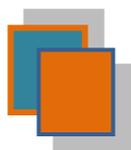
- a. MISI 5 (RPJMD) : Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;
- b. MISI 6 (RPJMD) : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan;

Uraian dari kedua Misi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman; yaitu berupa penyediaan sarana sanitasi (drainase dan limbah permukiman), air minum, jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang berhubungan dengan konteks perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan kebutuhan dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata; memperbanyak Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kegiatan sejenis lainnya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan database perumahan yang akurat untuk mewujudkan kualitas perumahan yang layak;
- 2) Menyediakan informasi tentang tata ruang yang akurat, terbuka dan akuntabel untuk mendukung pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- 3) Menyediakan pelayanan perencanaan, pelaporan OPD, administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan.

Tabel 1.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p><i>Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil – Makmur dan Mandiri</i></p> <p>MISI 5 (RPJMD) Menciptakan Iklim Investasi yang Berorientasi Perluasan Kesempatan Kerja yang Berbasis Potensi Lokal dan Ramah Lingkungan;</p> <p>MISI 6 (RPJMD) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Memadai Sebagai Daya Ungkit Pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya cakupan akses sanitasi layak dan baerkelanjutan • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS • Masih kurangnya infrastruktur sanitasi yang memadai • Belum optimalnya pengelolaan SPAL oleh masyarakat • Masih rendahnya cakupan akses air minum aman, layak dan berkelanjutan • Masih rendahnya infrastruktur air bersih • Belum optimalnya pengelolaan SPAM oleh masyarakat • Minimnya jumlah sumber air yang bisa dimanfaatkan • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan tata ruang • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketaatan aturan tata ruang • Masih kurangnya personil untuk pemantauan pengendalian tata ruang • Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan inverstasi • Bekembangnya lingkungan Kumuh perkortaan • Masih kurangnya kuantits dan kualitas infrastruktur • Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni • Masih tingginya backlog kebutuhan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpadu dan sinergisnya penanganan kemiskinan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman • Adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan • Adanya keterbatasan personil yang menangani • Adanya keterbatasan sarpras yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Kepala daerah dalam penangan Perumahan dan Permukiman • <i>Stakeholders</i> yang banyak memberikan potensi penganggaran diluar pemerintah daerah seperti ZIS, CSR dan sumber-sumber lain



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja DINPERKIM 2020

Perencanaan Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari Program dan Kegiatan tahun 2020.

Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 yang disusun setiap lima tahun.

PK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

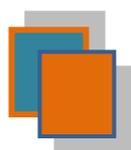
Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,982
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	2 Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	%	0,018
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	3 Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	85,17
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	4 Persentase Permukiman yang Tertata	%	9,45
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	5 Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	%	76,81

Tabel 2.2
RENCANA ANGGARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG MENDUKUNG PK	
		Nama	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	626.854.601
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	442.134.729
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	34.840.342.091
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	Program Pengembangan Perumahan	12.455.890
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	8.605.477.778
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	180.286.600



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,982	99,982	100,00
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,018	0,018	100,00
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	<i>Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni</i>	%	85,17	85,20	100,04
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	<i>Persentase Permukiman yang Tertata</i>	%	9,45	9,32	98,62
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	<i>Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar</i>	%	76,81	78,76	102,54

Keterangan Warna pada Tabel

TIDAK SESUAI
TARGET

SESUAI TARGET

MELAMPAUI
TARGET

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Ada 5 (lima) Sasaran Strategis dalam IKU tahun 2020, yang merupakan Tujuan dan Sasaran pada RENSTRA DINPERKIM 2019-2023. Adapun Kelima Sasaran tersebut mempunyai masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja. Penjelasan Capaian Indikator IKU 2020 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,982	99,982	100,00

Sasaran Strategis 1 :**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang**

Untuk mencapai Sasaran Strategis 1, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang***.

Pencapaian IKU "***Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang***" sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **99,982 %**, ini artinya *Luas Area Sesuai Peruntukannya (Sesuai RTRW)* adalah 132.734 Hektar dibagi *Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang)* 132.758 Hektar.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,018	0,018	100,00%

Sasaran Strategis 2 :**Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang**

Untuk mencapai Sasaran Strategis 2, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu

Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang

Pencapaian IKU "***Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang***" sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar 0,018 %, ini artinya *Luas Pemanfaatan tdk sesuai Peruntukan* adalah 24 Hektar dibagi *Luas Wil. Kab. Banyumas (Luas Renc. Pola Ruang)* 132.758 Hektar.

Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang Pencapaiannya Sesuai Target sebesar 100,00 persen.

Indikator 1 dan 2 berhasil dicapai Sesuai Target karena Kesadaran masyarakat yang semakin baik tentang pentingnya penggunaan ruang dan perijinan tata ruang, akan tetapi Sosialisasi tentang Peraturan Tata Ruang tetap dilaksanakan setiap tahun.

Keterangan Rencana Daerah (KRD)/*Advice Planning* adalah satu dokumen yang harus dilengkapi dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Banyumas. *Advice Planning* ini menjadi salah satu Indikator Ketaatan Terhadap RTRW.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, *Advice Planning* adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu.

Advice Planning berisi :

- ✓ Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
- ✓ Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
- ✓ Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
- ✓ Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
- ✓ KDB maksimum yang diizinkan;
- ✓ KLB maksimum yang diizinkan;
- ✓ KDH minimum yang diwajibkan;
- ✓ KTB maksimum yang diizinkan; dan
- ✓ Jaringan utilitas kota.

Tabel 3.4



Tabel 3.5

**Perbandingan Jumlah Pemohon Advice Planning
Tahun 2017 - 2020**

NO	BULAN	2017	2018	2019	2020
1	Januari	132	133	228	386
2	Februari	196	121	154	278
3	Maret	145	147	216	223
4	April	150	119	135	101
5	Mei	140	139	161	81
6	Juni	98	44	160	173
7	Juli	131	113	211	282
8	Agustus	170	146	228	238
9	September	153	128	192	190
10	Oktober	141	163	171	311
11	November	144	167	219	229
12	Desember	110	121	201	221
	TOTAL	1710	1541	2276	2713

Tabel 3.6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	<i>Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni</i>	%	85,17	85,20	100,04%

Sasaran Strategis 3 :**Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni**

Untuk mencapai Sasaran Strategis 3, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu **Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni**.

Pencapaian IKU "**Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni**" sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **85,20 %**, ini artinya *Luas Permukiman Layak Huni (Proyeksi)* adalah 3.294 Hektar dibagi *Luas Perkotaan* 3.866 Hektar.

Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 100,04 persen.

Indikator No.3 dapat melebihi target, karena didukung oleh Program Pengembangan Kawasan Permukiman yang didalamnya terdapat Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Talud dan Sarana Prasarana Umum Lainnya.

Tabel 3.7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	<i>Persentase Permukiman yang Tertata</i>	%	9,45	9,32	98,62%

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata

Untuk mencapai Sasaran Strategis 4, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Permukiman yang Tertata***.

Pencapaian IKU "***Persentase Permukiman yang Tertata***" sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **9,32 %**, ini artinya *Luas Permukiman Tertata (Proyeksi)* adalah 1.775 Hektar dibagi *Luas Permukiman keseluruhan* 19.047 Hektar.

Persentase Permukiman yang Tertata Pencapaiannya Tidak Sesuai Target atau dibawah Target yaitu sebesar 98,62 persen.

Hal ini karena Capaian Permukiman Kumuh yang Tertangani tahun sebelumnya telah 100 persen, artinya SK Bupati Nomor.050/1444 Tahun 2014 tentang Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas sebesar 69,58 Hektar telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan untuk Tahun 2020 menggunakan SK baru, yaitu SK Bupati Nomor.660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Banyumas. SK Kawasan Kumuh baru terbit di akhir tahun 2020, sehingga Kegiatan Penanganan Kawasan belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2020. Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh yang bisa dilakukan hanya Jasa Konsultansi DED Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Kedungwuluh.

Tabel 3.8

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 Nomor : 660/630 /Tahun 2020
 Tentang : PENETAPAN LOKASI DAN LUASAN
 KAWASAN KUMUH PERKOTAAN DI
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR LOKASI DAN LUASAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
 DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	LOKASI	LUAS KUMUH (Ha)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)
1	Kawasan Unsoed:		23,24
	Grendeng	13,48	
	Karangwangkal	5,02	
	Arcawinangun	4,74	
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa:		16,13
	Purwokerto Lor	3,3	
	Purwokerto Kidul	4,99	
	Purwokerto Kulon	4,35	
	Purwokerto Wetan	3,49	
3	Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji):		15,9
	Kedungwuluh	5,06	
	Kranji	7,52	
	Bantarsoka	3,32	
4	Kawasan Purbomampir (Purwanegara-Bobosan-Sumampir):		14,73
	Purwanegara	5,52	
	Bobosan	2,96	
	Sumampir	6,25	
5	Kawasan Takarpucung (Tanjung-Karangklesem-Karangpucung):		12,94
	Tanjung	3,95	
	Karangklesem	5,12	
	Karangpucung	3,87	
	Kelurahan:		
6	Sokanegara	3,02	3,02
7	Pasirmuncang	3,26	3,26
8	Bancarkembar	0,76	0,76
9	Berkoh	1,47	1,47
10	Karanglewas Lor	2,5	2,5
11	Kober	2,22	2,22
12	Mersi	5,87	5,87
13	Pabuwran	2,88	2,88
14	Pasir Kidul	0,81	0,81
15	Rejasari	4,07	4,07
16	Teluk	5,9	5,9
TOTAL LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)			115,7



Tabel 3.9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	<i>Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar</i>	%	76,81	78,76	102,54%

Sasaran Strategis 5 :

Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar

Untuk mencapai Sasaran Strategis 5, ada 1 (satu) Indikator yang mendukung, yaitu ***Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar***.

Pencapaian IKU "***Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar***" sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar **78,76 %**, ini artinya *Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni* adalah 358.205 Unit dibagi *Jumlah Seluruh Rumah* 454.801 Unit.

Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar Pencapaiannya Melampaui Target sebesar 102,54 persen.

Indikator 5 berhasil Melampaui Target karena Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, yang merupakan Cikal Bakal Rumah Sehat sampai dengan tahun 2020 telah ditangani sebanyak 1.898 rumah, yang terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

- ✓ BSPS (1.230 unit)
- ✓ BANKEUPROV (468 unit)
- ✓ DAK Perumahan (195 unit)
- ✓ CSR (8 unit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

Jumlah total rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 96.596 rumah, sampai dengan akhir tahun 2020 sudah ditangani sebanyak 1.898 rumah, sementara program dari CSR (Corporate Social Responsibility) masih perlu digali dan di dorong dalam upaya mendukung program penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Permasalahan yang terjadi dalam upaya pencapaian indikator antara lain, anggaran untuk program Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) yang berasal dari APBD masih minim dan terjadinya perubahan data dasar (PBDT/Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memberikan *support* anggaran yang memadai untuk program penanganan RTLH dan harus melakukan pemutakhiran mandiri berbasis data terpadu.

Tabel 3.10
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian PK Tahun 2020



C. Perbandingan Capaian Indikator PK dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11

NO	Indikator Kinerja 2019	Indikator Kinerja 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Naik/Turun (%)
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	99,981	99,982	0,0010
2	Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang	0,019	0,018	-0,0010
3	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	84,27	85,20	0,93
4	Persentase Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	9,25	9,32	0,07
5	Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar	78,47	78,76	0,29

Analisis :

1. Semua Indikator Trennya Positif dan mengalami kenaikan yang cukup bagus, kecuali Indikator nomor 2 dengan Tren Negatif (dimana semakin rendah realisasi semakin baik).
2. Indikator No.3 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena banyaknya pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana umum.
3. Indikator No.2 menggunakan Tren Negatif sehingga semakin rendah realisasi, capaian semakin baik.

Tabel 3.12

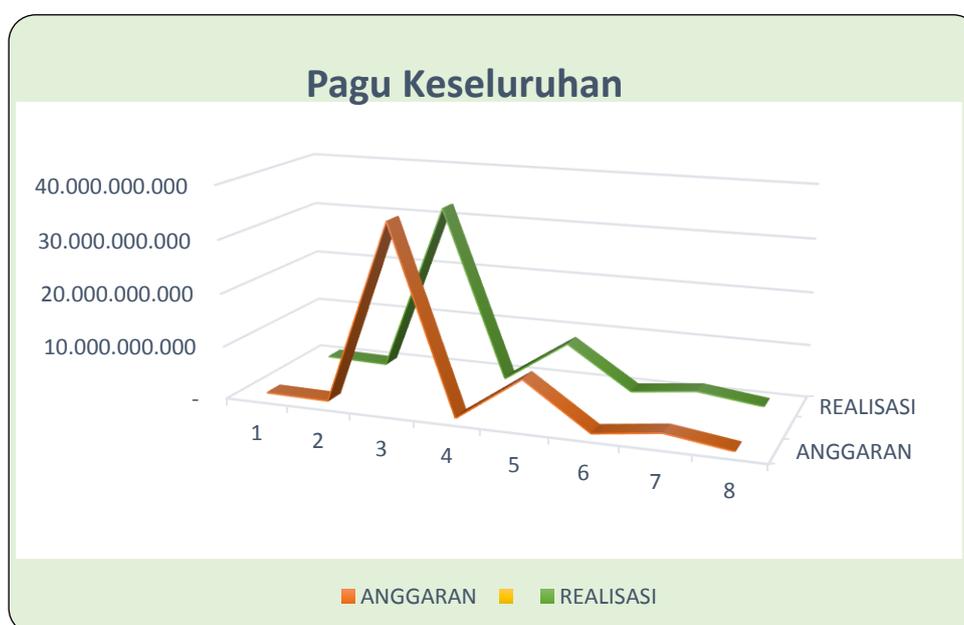


D. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.13
Pagu Anggaran dan Realisasi Keseluruhan

	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	626.854.601	595.841.250
2	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	442.134.729	163.895.100
3	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	34.840.342.091	8.175.286.550
4	Program Pengembangan Perumahan	12.455.890	313.289.717
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	8.605.477.778	6.132.770
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	180.286.600	32.546.969.916
7	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.772.689.905	1.564.142.542
8	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	56.098.590	52.579.790
JUMLAH		46.536.340.184	43.418.137.635

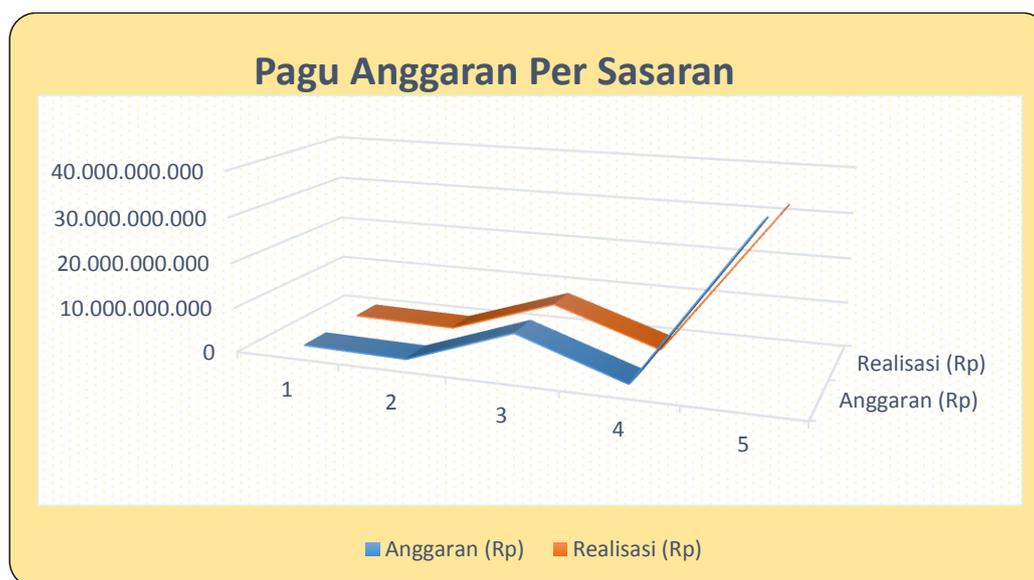
Tabel 3.14
Diagram Pagu Keseluruhan



Tabel 3.15
Pagu Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG MENDUKUNG PK	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	626.854.601	595.841.250
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	442.134.729	163.895.100
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	34.840.342.091	8.175.286.550
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	12.455.890	313.289.717
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	8.605.477.778	6.132.770
JUMAH TOTAL		44.707.551.689	41.801.415.303

Tabel 3.16
Diagram Pagu Per Sasaran



Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	595.841.250	95,05
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	163.895.100	90,91
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	8.175.286.550	95,00
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	313.289.717	70,27
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	6.132.770	93,42
			Rata-rata		88,93

Analisis :

- ✓ Tingkat Efektivitas Anggaran dihitung dengan cara Membandingkan Realisasi Anggaran Tiap Sasaran dengan Pagu Anggaran dikalikan 100, dimana semakin Kecil Nilai Efektivitas semakin Baik
- ✓ Sasaran 1 Nilai Efektivitasnya 95,05 %
- ✓ Sasaran 2 Nilai Efektivitasnya 90,91 %
- ✓ Sasaran 3 Nilai Efektivitasnya 95,00 %
- ✓ Sasaran 4 Nilai Efektivitasnya 70,27 % (Sangat Efektif)
- ✓ Sasaran 5 Nilai Efektivitasnya 93,42 %
- ✓ Rata-Rata Tingkat Efektivitas Seluruh Sasaran sebesar 88,93 %

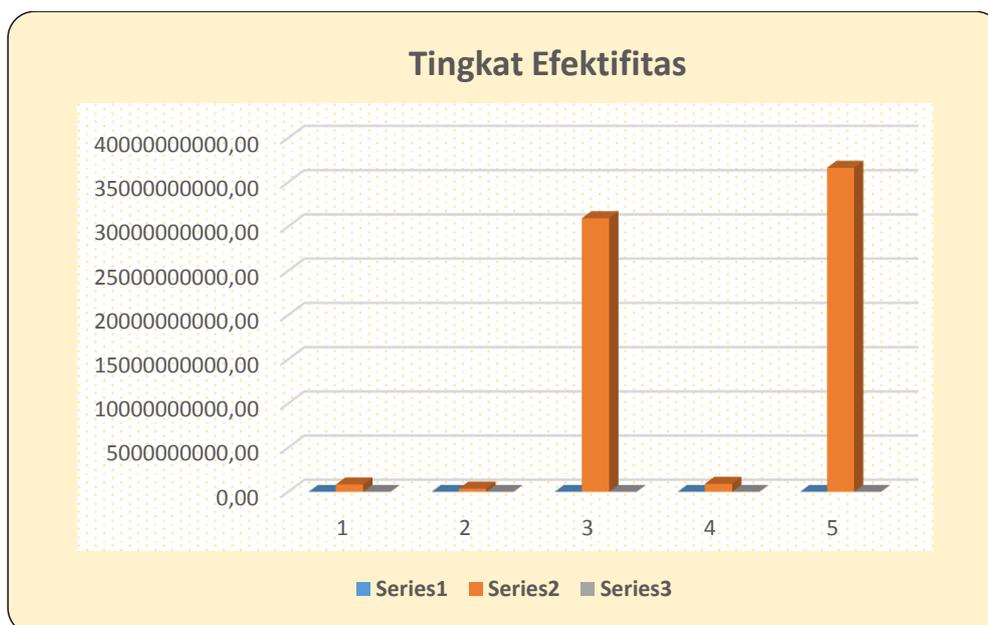
Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	95,05	4,95
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	90,91	9,09
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	95,00	5,03
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	70,27	-
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	93,42	9,12
			Rata-rata		5,64

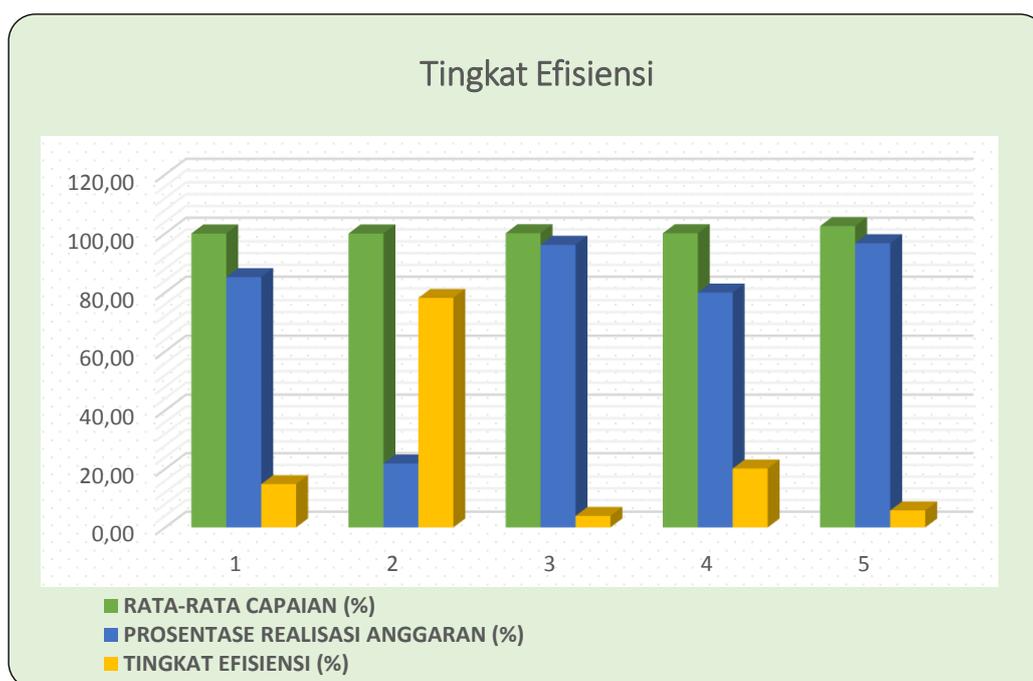
Analisis :

- ✓ Tingkat Efisiensi Anggaran dihitung dengan cara, Mengurangi Rata-rata Capaian Indikator Kinerja dengan Prosentase Realisasi Anggaran per Sasaran. Dimana semakin Besar Nilai Efisiensinya semakin Baik
- ✓ Sasaran 1 Nilai Efisiensinya 4,95 %
- ✓ Sasaran 2 Nilai Efisiensinya 9,09 %
- ✓ Sasaran 3 Nilai Efisiensinya 5,03 %
- ✓ Sasaran 4 Nilai Efisiensinya 0 % (tidak bisa dihitung karena capaian dibawah 100 %)
- ✓ Sasaran 5 Nilai Efisiensinya 9,12 %
- ✓ Rata-rata Tingkat Efisiensi Anggaran seluruh Sasaran sebesar 5,64 %

Tabel 3.17
Diagram Tingkat Efektifitas



Tabel 3.19
Diagram Tingkat Efisiensi





BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas menetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	<i>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang</i>	%	99,982	99,982	100,00
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	<i>Persentase Menurunnya Pelanggaran Tata Ruang</i>	%	0,018	0,018	100,00
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	<i>Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni</i>	%	85,17	85,20	100,04
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	<i>Persentase Permukiman yang Tertata</i>	%	9,45	9,32	98,62
5	Meningkanya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	<i>Persentase Rumah yang Sehat sesuai Standar</i>	%	76,81	78,76	102,54

- **Sasaran 1 tercapai dengan nilai 100,00 %**
- **Sasaran 2 tercapai dengan nilai 100,00 %**
- **Sasaran 3 tercapai dengan nilai 100,04 %**
- **Sasaran 4 tercapai dengan nilai 98,62 %**
- **Sasaran 5 tercapai dengan nilai 102,54 %**

Dari 5 Sasaran Tingkat Efektifitas Anggaran Rata-rata sebesar 88,93 %

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	595.841.250	95,05
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	163.895.100	90,91
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	8.175.286.550	95,00
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	313.289.717	70,27
5	Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	6.132.770	93,42
Rata-rata					88,93

Dari 5 Sasaran Tingkat Efisiensi Anggaran Rata-rata sebesar 5,64 %

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN (%)	PROSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1	100,00	95,05	4,95
2	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	100,00	90,91	9,09
3	Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	1	100,04	95,00	5,03
4	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Tertata	1	98,62	70,27	-
5	Meningkatnya Jumlah Rumah Sehat Sesuai Standar	1	102,54	93,42	9,12
			Rata-rata		5,64

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2020. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk masa mendatang.

Purwokerto, Februari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19671229 199002 1 002

LAMPIRAN PK DINPERKIM 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. JUNAIDI, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : BUPATI BANYUMAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA

Ir. JUNAIDI, MT
NIP. 196612131993031005

PERJANJIAN KINERJA

SKPD

: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN

: 2020

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni				
	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	Formulasi : Luas Permukiman layak huni (proyeksi-ha) dibagi Luas Perkotaan (ha) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : 1. Bidang Pengembangan Perumahan 2. Bidang Pengembangan Permukiman 3. Bidang Penyehatan Lingkungan	%	85.17
Meningkatnya lingkungan permukiman yang tertata				
	Persentase permukiman yang tertata	Formulasi : Luas Permukiman Tertata (proyeksi-ha) dibagi Luas Permukiman keseluruhan (ha) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Bidang Pengembangan Permukiman	%	9.45
Meningkatnya jumlah rumah sehat sesuai standar				
	Persentase rumah sehat sesuai standar	Formulasi : Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni (unit) dibagi Jumlah Seluruh Rumah (unit) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : 1. Bidang Pengembangan Perumahan 2. Bidang Pengembangan Permukiman 3. Bidang Penyehatan Lingkungan	%	76.81
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang				
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Formulasi : Luas Area sesuai peruntukannya (sesuai RTRW-ha) dibagi Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang-ha) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Bidang Penataan Ruang	%	99.982

Meningkatnya Ketaatan Terhadap RTRW				
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Formulasi : Luas Area sesuai peruntukannya (sesuai RTRW-ha) dibagi Luas Wilayah Kab Banyumas (Luas Rencana Pola Ruang-ha) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Bidang Penataan Ruang	%	99.982
	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	Formulasi : Luas Pemanfaatan tdk sesuai Peruntukan (ha) dibagi Luas Wil. Kab. Banyumas (Luas Renc. Pola Ruang-ha) x 100 Perhitungan : non kumulatif Sumberdata : Bidang Penataan Ruang	%	0.018

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	200.000.000,00	APBD
2	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	11.484.620.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2.136.400.000,00	APBD
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	600.000.000,00	APBD
5	Program Pengembangan Perumahan	675.000.000,00	APBD
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	36.692.896.000,00	APBD
7	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	100.000.000,00	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	118.000.000,00	APBD
TOTAL		52.006.916.000,00	

Purwokerto, 02 Januari 2020

PIHAK KEDUA

Ir. ACHMAD HUSEIN
BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA

Ir. JUNAIDI, MT
NIP. 196612131993031005